

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori yang menjadi dasar pokok permasalahan. Teori yang akan dibahas dalam bab ini meliputi definisi kemiskinan dan juga kaitan kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Selain itu akan dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Suparlan (2004), kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong orang miskin.

Menurut Ritonga (2003), mendefinisikan kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. (Suryawati, 2005). Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Adapun ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2005), yakni sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.

3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena ketiadaan investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), janda miskin, dan kelompok marjinal dan terpencil.

Dimensi kemiskinan menyangkut aspek-aspek sebagai berikut menurut Suharto (2005):

1. Aspek ekonomi, secara ekonomi kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
2. Aspek politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan system politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya

3. Aspek sosial-psikologis, kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Kemiskinan juga dibagi dalam empat bentuk (Suryawati, 2005). yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut, Kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti, tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan juga data dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun (2001), dalam Suryawati (2005), beberapa sumber proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh Malthus, bahwa pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir,

akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

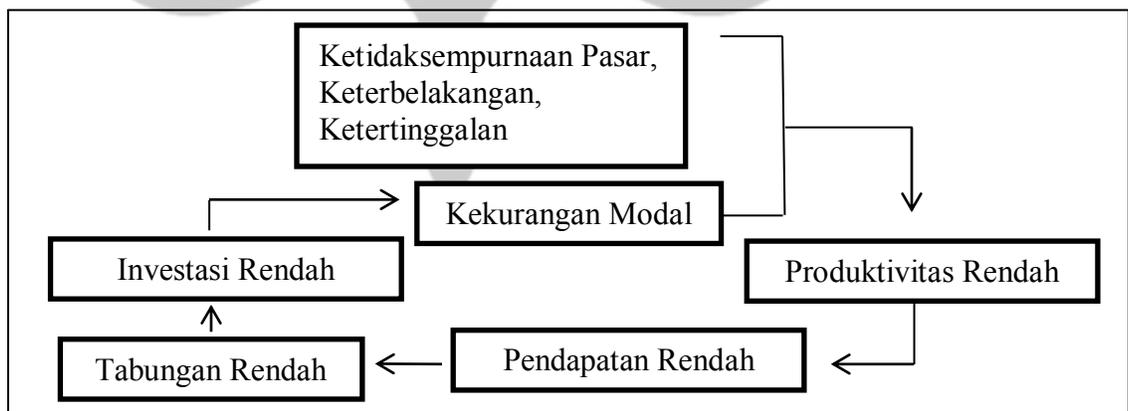
- f. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerja faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pada pola konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploitatif inetmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong seperti rentenir.
- i. *Internal political fragmentation and civil stratve*, suatu kebijakan yang diterapkan ada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Sementara itu menurut Mudrajad (2006:120), dalam Putri (2014), mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hsnys memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse yang mengatakan: “a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi ada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse
Sumber : Putri (2014)

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan pusat statistik (BPS), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2.100 kalori per orang dalam satu hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah perdesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2.100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang atau penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila diandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah perdesaan dan perkotaan (Suryawati, 2005).

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara atau Daerah, Wilayah yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2003 dalam Tirta 2013 dan Nisbah 2018). Adanya pertumbuhan ekonomi meruakan indikasi pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini, berarti terjadinya peningkatan pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Sukrino (2012) Hambasari dan Inggit (2016) dalam Nisbah (2018), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendatan nasional rill semakin berkembang, tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kanaan pendapatan nasional rill pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan degan pendapatan nasional rill pada tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Kuncoro (2014) dalam Nisbah (2018) pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu.

Pembangunan ekonomi salah satunya dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator untuk menentukan

apakah kebijakan yang dilaksanakan dalam suatu negara ataupun daerah yang sudah efektif atau tidak. Perhitungan pertumbuhan ekonomi biasanya dilakukan dalam waktu tahunan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian di negara ataupun di daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau regional. Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu, nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun tertentu hanya mengukur pertumbuhan perekonomian diwilayah, ada umumnya wilayah provinsi atau kabupaten. Adapun cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB rill merupakan nilai tambah yang barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan (tahun dasar), baik saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, maupun komponen nilai tambah.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan

dalam suatu wilayah yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan (*current price*), baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, maupun nilai tambah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Gt = \frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1} \times 100 \%$$

Dimana :

Gt = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun tertentu.

PDRB t-1 = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi atau Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran Pertumbuhan Ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Adapun Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi menurut Todaro (2003) dalam (Prastyo 2014 dan Nisbah 2018), ada tiga faktor-faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian pendapatan sekarang ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memerbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional, ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi yaitu :

- a. kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika output dicapai lebih tinggi dari kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih efektif.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (dalam

satuan persen). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “ perluasan pilihan “ dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dimensi kehidupan yang layak (BPS, 2019).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Menurut Badan Pusat Statistik (2019), IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar hidup. IPM terdiri dari tiga indeks dasar yaitu

indeks harapan hidup, Indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Rumus perhitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} [X(1) + X(2) + X(3)]$$

di mana :

X(1) = Indeks harapan hidup

X(2) = Indeks pendidikan

X(3) = Indeks standar hidup layak

Berdasarkan konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan bangsa-bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- a) Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b) Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- c) Menengah Bawah : IPM 50,0 – 65,9
- d) Rendah : IPM kurang dari 50,0

Menurut Todaro (2000), (Sukmaraga 2011:36) dalam Putri (2014), pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

IPM menurut Badrudin, (2012:154), dalam Alhudori (2017) IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak. IPM mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basiccapabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/paritas daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan manusia yakni sebagai berikut:

a. Komponen Kesehatan

Dalam indeks pembangunan manusia, komponen kesehatan ini tercermin dalam usia harapan hidup masyarakat yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar *United Nations Development Programme* (UNDP), dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.

b. Komponen Pendidikan

Dalam indeks pembangunan manusia komponen pendidikan diwakili oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Melek Huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum adalah 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sedangkan Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP).

c. Komponen Daya Beli

Dalam indeks pembangunan manusia komponen daya beli diwakili oleh Pendapatan Perkapita Riil yang disesuaikan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang sudah distandarkan dengan mendeflasikan melalui indeks harga konsumen.

2.1.5. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin merupakan keseluruhan dari penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, maka dari itu pertumbuhan ekonomi yang baik haruslah menyebar secara merata ke golongan masyarakat termasuk penduduk miskin.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai macam pernyataan dan masalah kesejahteraan, namun hal tersebut tetap

merupakan unsur penting dalam program pembangunannya dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli ekonomi telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam penurunan tingkat kemiskinan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan-tujuan pembangunan. Kedua hal tersebut kadang tidak bisa tumbuh secara bersama-sama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu distribusi pendapatan yang lebih baik. (Todaro 2000 dalam Asrianti, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata bisa saja sekaligus diraih. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang harus berjalan secara bersama-sama. Pilihan yang diambil adalah bukan strategi pembangunan yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi cepat, yang hasilnya hanya di nikmati segelintir orang kaya didalam suatu daerah tertentu atau bukan juga strategi yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata, tetapi kedua hal tersebut penting untuk diraih secara bersama-sama. (Todaro 2000:212 dalam Asrianti, 2017).

Menurut Kuznet (2001) dalam (Saputra 2011 dan Nisbah 2018), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah rang miskin berangsur-angsur

berkurang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Kualitas pembangunan manusia menjadi hal yang penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi. Penekanan terhadap kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena dengan sumber daya yang unggul akan menghasilkan seluruh kehidupan yang maju diberbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga kualitas manusia memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya. Untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari capaian angka IPM. Angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup layak. Jadi setiap kabupaten/kota yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah selanjutnya pendaatan akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Menurut Todaro 2006 dalam Putri 2014. Modal manusia (pendidikan dan kesehatan)

berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan, karena dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai.

Menurut Susiati 2012 dalam Putri 2014, kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Apabila kualitas sumber daya manusia tinggi, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi akan menyebabkan produktivitas yang tinggi sehingga pendapatanpun menjadi meningkat. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan yang tinggi juga akan tercermin pada IPM yang tinggi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

2.3 Studi Terkait / Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Estrada dan Wenagama (2019), yang menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, dan Tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data sekunder, dan menggunakan teknik analisis data panel yang dibantu dengan *software Eviews*. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2009-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2013), menganalisis pengaruh PDRB, Pengangguran, dan juga IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2011, dengan menggunakan analisis data panel, dengan menggunakan analisis data *cross section*, dan juga *time series*. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, pengangguran dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohani (2016) yang dalam penelitiannya menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi selatan. Dengan menggunakan data sekunder dan memakai teknik analisis metode analisis kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda dengan bantuan software Spss. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan, pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi selatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nisbah (2018), yang dalam penelitiannya menganalisis tentang pengaruh tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten / kota Medan, Binjai, Deli, Serdang, Karo, Dan Langkat. Dengan menggunakan data sekunder dan model ekonometrik yang menggunakan teknik analisis regresi data panel yang memakai

software views. Berdasarkan hasil regresi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Medan, Binjai, Deli, Serdang, Karo, Dan Langkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Usman dan Evi (2018) tentang pengaruh PDRB, investasi industri kecil, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Aceh. Dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan investasi industri kecil berpengaruh negatif dan signifikan dan jumlah penduduk berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe (Aceh).

Penelitian juga dilakukan oleh Bintang dan Woyanti (2018), yang meneliti tentang pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu 2011 sampai 2015, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, dengan model fixed effect model. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan, pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Andyka, Handayani, dan Woyanti (2018), tentang analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan data sekunder, dan metode analisis data panel dengan model regresi fixed effect model, hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.

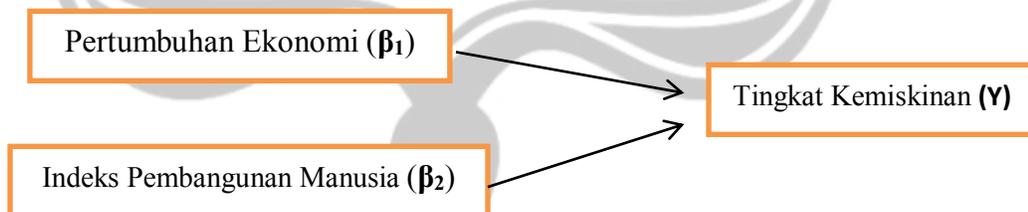
Penelitian yang dilakukan oleh Alhudori (2017), melakukan penelitian tentang pengaruh IPM, PDRB, dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi, dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan positif terhadap penduduk miskin, PDB memiliki hubungan negatif terhadap penduduk miskin, dan jumlah pengangguran memiliki hubungan positif terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2012), meneliti tentang analisis pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengangguran, pendidikan, dan kesehatan, terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2004-2009, dengan alat analisis panel data. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data panel dengan menggunakan pendekatan *Common Effect*. Hasil menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan Belanja publik berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2.4 Kerangka Pikir

Untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti maka berdasarkan uraian penelitian diatas, adapun asumsi dasar variabel ini adalah kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian